

RINGKASAN

Pada era desentralisasi, pemerintah dituntut agar mampu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kebijakan publik dalam suatu sistem demokrasi akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, karena pembuat kebijakan maupun manajer publik dipilih oleh masyarakat, sehingga masyarakat menuntut kondisi pemerintah yang bersih, tanggung jawab, dan transparan, sehingga kebutuhan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah semakin tinggi. Namun ditemukan kegagalan akuntabilitas keuangan organisasi pemerintah yang menunjukkan bahwa keberhasilan dan kegagalan program kegiatan hanya berdasarkan penyerapan anggaran, penyusunan laporan akuntabilitas dianggap sebagai formalitas dan rendahnya kualitas substansi, keakurasian informasi. Salah satu daerah yang mengalami permasalahan lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yakni Kabupaten Banyumas. Dimana program dana desa yang merupakan bagian dari APBN pada tahun 2016 di Kabupaten Banyumas menunjukkan masih rendahnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini terjadi ketika kompetensi sumber daya aparatur desa yang belum merata dan terjadinya keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban oleh beberapa desa yang berdampak pada keseluruhan desa di Kabupaten Banyumas. Desa Dermaji merupakan desa yang penggunaan dana desanya terserap paling tinggi di Kecamatan Lumbir serta banyak prestasi yang dicapai Desa Dermaji, sehingga hal ini menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tahun 2016. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas dari Koppell dengan pendekatan *transparency*, *liability*, *controlability*, *responsibility*, dan *responsiveness* yang diyakini relevan dengan permasalahan akuntabilitas dana desa di Dermaji.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang diarahkan pada latar individu secara holistik (utuh) berupa kata-kata dan gambar. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* pemilihan informan yang benar-benar mengerti tentang informasi objek penelitian dan informan dapat dipercaya sebagai sumber data yang berkompeten dan untuk memperoleh data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Sedangkan validitas data menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek kembali tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Dermaji telah berhasil dilihat dari aspek *transparency*, dimana publik dapat mengakses dengan mudah pertanggungjawaban pengelolaan dana desa melalui media informasi yang ada baik laman desa maupun infografik APBDes Desa Dermaji. Aspek *liability*, bahwa Pemerintah Desa Dermaji dalam melakukan kegiatan pengelolaan dana desa

telah melalui pola penjaringan Tim PTPKD sesuai aturan dan telah memahami konsekuensi yang diterimanya. Aspek *controllability*, mekanisme pertanggungjawaban yang telah dilakukan Pemerintah Desa Dermaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara vertikal maupun horizontal serta menjaga komunikasi dan koordinasi antar lembaga pemerintahan. Aspek *responsibility*, pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa Dermaji dengan menetapkan standar kompetensi serta Kepala Desa yang berkompeten dalam pengelolaan pembangunan desa serta kepatuhan pada aturan yang telah ditetapkan. Aspek *responsiveness*, daya tanggap kebutuhan publik pada Pemerintah Desa Dermaji dibangun dengan adanya komunikasi yang baik melalui musyawarah serta tujuan Desa Dermaji yang dapat dipahami oleh perangkat desa maupun masyarakat. Disamping itu peran kepala desa yang berkompeten dalam manajemen pembangunan desa yang dibangun melalui jaringan aspirasi masyarakat dan dedikasi yang tinggi untuk perubahan kearah yang lebih baik.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Media Informasi, Pengelolaan

SUMMARY

In the era of decentralization, the government is required to be able to realize the accountability of state financial management. Public policy in a democratic system will be better suited to the needs and aspirations of the people, because policymakers and public managers are chosen by the community, so that the public demands clean, accountable, and transparent government conditions, so that the need for government financial accountability is higher. However, the failure of financial accountability of government organizations shows that the success and failure of program activities is only based on budget absorption, the preparation of accountability report is considered as a formality and low quality of substance, the accuracy of information. One of the regions experiencing the weakness of accountability of state financial management that is Banyumas Regency. Where the village fund program that is part of the state budget in 2016 in Banyumas District shows the low level of accountability of village fund management. This occurs when the resource competencies of the rural apparatus are uneven and the delay in accountability reporting by some villages has an impact on the whole village in Banyumas District. The village of Dermaji is the village with the highest utilization of village funds in Kecamatan Lumbir as well as the many achievements of Dermaji Village, so it is interesting to study. The purpose of this research is to know accountability of village fund management at Dermaji Village Government of Lumbir Sub-district of Banyumas Regency 2016. This research uses accountability theory from Koppell with approach of transparency, liability, controllability, responsibility, and responsiveness which is believed to be relevant to accountability of village fund in Dermaji.

This research uses descriptive qualitative method as a research procedure that produces descriptive data directed at individual background in holistic (intact) form of words and pictures. Selection of informants using purposive sampling technique The selection of informants who really understand about the information of the research object and the informant can be trusted as a competent data source and to obtain data by using interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques using interactive analysis model and lasted continuously until complete, so the data is saturated. While the validity of the data using source triangulation is by comparing and checking back the level of confidence of the information obtained.

The results of the research show that the accountability of village financial management in Dermaji Village Government has been successfully viewed from the transparency aspect, where the public can easily access accountability of village fund management through the existing information media both village and infographic pages of APBDes Desa Dermaji. The liability aspect, that the Village Government of Dermaji in carrying out the village fund management activities has been through the pattern of the

PTPKD Team selection according to the rules and has understood the consequences it receives. Aspects of controllability, mechanisms of accountability that have been done Dermaji Village Government in accordance with applicable provisions both vertically and horizontally and maintain communication and coordination between government agencies. Aspects of responsibility, management of village funds to Dermaji Village Government by setting competency standards as well as Village Heads who are competent in managing village development and compliance with established rules. Aspects of responsiveness, responsiveness of public needs to Dermaji Village Government built with good communication through deliberations and goals Dermaji Village that can be understood by the village and community tools. In addition, the role of the village head is competent in village development management that is built through a network of community aspirations and high dedication to change towards the better.

Keywords: Accountability, Information Media, Management, Village Funds